

**IKLIM SEKOLAH LANJUTAN ATAS NEGERI DITINJAU DARI  
DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG  
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

DISERTASI



Oleh  
**M. DAUD BATUBARA**  
NIM 93237

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam  
mendapatkan gelar Doktor Ilmu Pendidikan

PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN  
PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2015

*Ya Robbi ....  
Yang telah memberiku segalanya  
Bantulah aku untuk pandai  
bersyukur kepada-Mu  
Bantulah aku untuk menjadi Soleh  
bagi Bunda dan Ayahku*

*Tutuplah Surgamu  
kalau aku beribadah karenanya  
Lenyakkanlah Neraka-Mu  
bila karena aku takut kepadanya*

*Jadilah ibadahku karena mencintai-Mu  
Karena Engkau ya Rob ...  
telah mencintaiku  
Melebihi kasih sayang  
dari semua makhluk-Mu*

## ABSTRACT

**M. Daud Batubara, 2014. Climate of The State High School Seen Impact of Local Government Election in Mandailing Natal. Dissertation. Postgraduate Program, Universitas Negeri Padang**

A stronger tendency of political intervention local elections for education/school complained of by teachers and school leaders, who secretly adversely affect the atmosphere of learning in high school State in Mandailing Natal. This condition can be seen from mutations and dismissal from the post of principals and school supervisors who do not post direct election by the rules.

The study aims to determine the conduciveness school climate on land before and after the direct election; identify the pattern of teacher involvement in the elections; identify forms of direct election impact on the school climate; reveal aspects of the causes of direct election impact on school climate and formulate patterns addressing the impact of direct elections on school climate.

The study used a combination of quantitative and qualitative methods Sequential Explanatory types. The study population was 476 civil servant teachers. In quantitative methods, the data collected by the questionnaire use Likert Scale, with a sample of 199 teachers based formula Isaac Michael. Qualitative methods using snowball sampling on in-depth interviews, supported by observation and documentation. Data analysis techniques used for quantitative data descriptive statistics Percentage whereas qualitative data with Qualitative Data Analysis of Miles and Huberman.

Research shows that an expanded quantitative and qualitative data deepened, with the following results: *First*, factors affecting school climate kondusifitas before direct election is the aspect of transparency and harmonization of relations, fair treatment and safety of teachers, job satisfaction and pride profesi. Sedangkan factors affecting school climate degradation is restriction aspects of information and involvement, security and respect, workload and achievement and suitability aspects of facility. *Second*, the involvement of teachers was raised in secret by the bureaucracy, especially the educational bureaucracy, with a massive way, structured and systematic in the pre-election persuasive manner and at the time of election to power pressure approach. *Third*, the impact of direct election to the school climate is negative, in the form of a rift teacher; appears apathy, decreased morale, and decreased sense of responsibility and motivation. *Fourth*, election impact on the school climate as a result of political interference and weak bargaining position of the school.

*Fifth*, addressing the impact of direct election conducted by the way; transfer pattern 3 M (men, money, material), strengthening the teaching profession independensi institutions, the determination of sanctions clear, detailed and firmly against the head of the local candidates who violates Article 70 paragraph 1 of Regulation No 1/2014, as well as the establishment of ethics and discipline for KDH .

## ABSTRAK

**M.Daud Batubara, 2015. Iklim Sekolah Lanjutan Atas Negeri Ditinjau Dari Dampak Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mandailing Natal. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.**

Menguatnya kecenderungan intervensi politik pemilihan kepala daerah terhadap dunia pendidikan/sekolah dikeluhkan oleh guru dan pimpinan sekolah, yang secara diam-diam berdampak buruk terhadap suasana belajar di Sekolah Lanjutan Atas Negeri di Kabupaten Mandailing Natal. Kondisi ini dapat dilihat dari terjadinya mutasi dan pemberhentian dari jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah pasca pilkada langsung yang tidak sesuai aturan.

Penelitian bertujuan mengetahui kondusifitas iklim sekolah lanjutan atas negeri sebelum dan setelah pilkada langsung; mengidentifikasi pola keterlibatan guru pada pilkada; mengidentifikasi bentuk dampak pilkada langsung pada iklim sekolah; mengungkap aspek penyebab pilkada langsung berdampak terhadap iklim sekolah dan merumuskan pola mengatasi dampak pilkada langsung pada iklim sekolah.

Penelitian menggunakan metode kombinasi kuantitatif dan kualitatif jenis *Sequential Explanatory*. Populasi penelitian sebanyak 476 guru PNS. Pada metode kuantitatif, data dikumpul memakai instrumen kuesioner dengan *Skala Likert*, dengan sampel 199 guru berdasarkan rumus *Isaac Michael*. Metode kualitatif menggunakan *snowball sampling* pada *in-depth interview*, didukung observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk data kuantitatif dilakukan *Statistik Dekriptif Persentase* sedangkan data kualitatif dengan *Analisis Data Kualitatif* dari *Miles* dan *Huberman*.

Penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitatif yang diperluas dan diperdalam data kualitatif, dengan hasil berikut: *Pertama*, faktor kondusifitas yang mempengaruhi iklim sekolah sebelum pilkada langsung adalah aspek keterbukaan dan harmonisasi hubungan, perlakuan adil dan keamanan guru, kepuasan kerja dan kebanggaan profesi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi degradasi iklim sekolah pasca pilkada adalah aspek pembatasan informasi dan keterlibatan, keamanan dan penghargaan, beban kerja dan prestasi serta aspek kesesuaian fasilitas. *Kedua*, keterlibatan guru digalang secara sembunyi oleh birokrasi, terutama oleh birokrasi pendidikan, dengan cara yang massif, terstruktur dan sistematis pada masa pra-pilkada dengan cara persuasif dan pada masa pilkada dengan pendekatan tekanan kekuasaan. *Ketiga*, dampak pilkada langsung terhadap iklim sekolah bersifat negatif, berupa keretakan hubungan guru; muncul sikap apatis, penurunan semangat kerja, dan menurunnya rasa tanggung jawab dan motivasi kerja. *Keempat* pilkada berdampak terhadap iklim sekolah sebagai akibat intervensi politik dan lemahnya posisi tawar sekolah.

*Kelima*, mengatasi dampak pilkada langsung dilakukan dengan cara; pola pengalihan 3 M (*men, money, material*), penguatan indevendensi lembaga profesi guru, penetapan sanksi yang jelas, detail dan tegas terhadap bakal calon kepala daerah yang melanggar pasal 70 ayat 1 Perpu No 1/2014, serta penetapan etika dan disiplin bagi KDH.

## Lembar Pengesahan

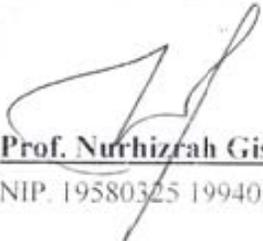
---

Dengan persetujuan Komisi Promotor/Pembahas/Penguji telah disahkan  
Disertasi atas nama :

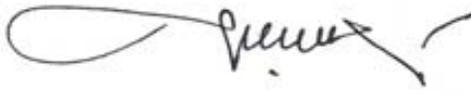
Nama : *M. Daud Batubara*  
NIM. : 93237

melalui ujian terbuka pada tanggal 5 Februari 2015

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Padang

  
Prof. Nurhizrah Gistituati, M.Ed., Ed.D.  
NIP. 19580325 199403 2 001

Ketua Program Studi/Konsentrasi

  
Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd.  
NIP. 19501104 197503 1 001

## Persetujuan Komisi Promotor/Penguji

---

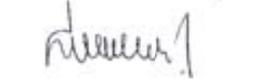
Nama : *M. Daud Batubara*  
NIM. : 93237

### Komisi Promotor/Penguji

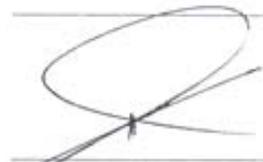
Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, M.Pd.  
(Ketua Promotor/Penguji)



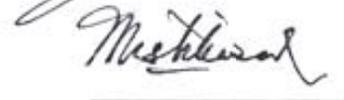
Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd.  
(Promotor/Penguji)



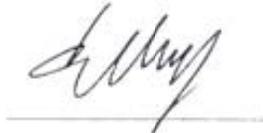
Prof. Dr. Gusril, M.Pd.  
(Promotor/Penguji)



Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.  
(Pembahas/Penguji)



Prof. Dr. Mestika Zed, M.A.  
(Pembahas/Penguji)



Prof. Dr. Helmi, M.Sc.  
(Penguji dari Luar)

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi dengan judul Iklim Sekolah Lanjutan Atas Negeri Ditinjau dari Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Mandailing Natal, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 21 Agustus 2014

Saya yang Menyatakan

METERAI  
TEMPEL



44A03ABF 19292808

6000



M. DAUD BATUBARA  
NIM 93237

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil' alamin*, syukur dan segala puji kepada Allah SWT, atas terselesaikannya penulisan Disertasi ini, yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Pendidikan pada Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Penulisan disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga sangat pantas disampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Sufyarma Marsidin, M.Pd., Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd. dan Prof. Dr. Gusril, M.Pd. sebagai Komisi Promotor yang selalu memberi pemikiran-pemikiran konstruktif, bimbingan, semangat, dan kesediaan waktu hingga selesainya penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mestika Zed, MA., Bapak Prof. Dr. Aswar Ananda, MA., selaku Pembahas, dan Bapak Prof. Dr. Helmi, MSc sebagai Penguji Eksternal Kelayakan Disertasi yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi dan memberikan pemikiran konstruktif untuk kesempurnaan penelitian.
3. Bapak Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram, M.Pd. sebagai Penyelia sekaligus Rektor Universitas Negeri Padang, yang telah meluangkan waktu membaca dan memberi saran untuk kesempurnaan hasil penelitian. Penghargaan dan terimakasih, juga disampaikan kepada Pembantu Rektor 1, 2, 3 dan 4.
4. Ibu Prof. Dr. Nurhizrah Gistituati, M.Ed, Ed.D. sebagai Penguji, Penyelia, dan sekaligus Direktur Program Pasca Sarjana yang telah meluangkan waktu memberikan pemikiran konstruktif dan wawasan dalam penyempurnaan penelitian.
5. Bapak dan Ibu Para Dosen dan Karyawan Pascasarjana dan seluruh Civitas Universitas Negeri Padang, demikian juga para pendidik saya di SD Negeri 1 Kota Nopan, SMP Negeri 1 Kota Nopan, SMA Negeri Kota Nopan. APDN Medan, STIA LAN-RI Kampus Bandung dan Pascasarjana Universitas Andalas Padang, dengan andil besar ikut menata pendidikan formal saya.

6. Bapak Walikota Padangsidempuan dan Bapak Bupati Mandailing Natal beserta seluruh jajarannya yang telah memberi kesempatan dan segala fasilitas yang selalu mendorong penyelenggaraan pendidikan ini.
7. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal beserta seluruh Kepala Sekolah, Guru dan kelembagaan terkait pendidikan yang sangat membantu dan bersahabat sebagai sampel penelitian.
8. Segalanya buat *Damang* (Ayahanda) H. Mutia Raja Batubara (alm) dan *Dainang* (Ibunda) Hj. Mariama Lubis (alm), *hatubuan ni tondi, poda na bisuk na peto*, (pemberi semangat pertama, ajaran yang bijak dan benar) juga *angkang* dan *anggi dongan sabutuha, dongan tubu* (kakak/abang dan adik, saudara kandung, kawan berjuang).
9. Siti Nurzulhidjah Nasution, S.Ag., istri tercinta dengan ketekunan ibadah, kesabaran dan kasih sayangnya, semoga Alloh selalu memuliakannya sebagai ahli sorga; *Tulang* (Ayah Mertua) H. Bahrum Arif Nasution gelar Baginda Paruhum dan *Nantulang* (Ibu Mertua) Hj. Rohana Harahap;
10. Teman Berjuang di Pascasarjana UNP, para sahabat dan seluruh keluarga atas dorongan, terutama doanya dalam menata kehidupan yang lebih baik.

Disertasi ini terbuka pada kritikan dan saran, untuk lebih bermanfaat bagi semua. Semoga Alloh melimpahkan rahmad dan hidayan-Nya kepada kita melebihi apa yang menjadi doa dan harapan kita, selalu dan selalu, amin.

Padang, Pebruari 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRACT .....	i
ABSTRAK .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR/PENGUJI .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13

### **BAB II. KAJIAN PUSTAKA**

A. Landasan Teori .....	15
1. Iklim Sekolah .....	15
a. Pengertian Iklim Sekolah .....	15
b. Urgensi Iklim Sekolah .....	19
c. Dimensi Iklim Sekolah .....	23
d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Iklim Sekolah .....	31
e. Kondusifitas Iklim Sekolah .....	34
2. Sistem Pemilihan Kepala Daerah dan Otonomi Daerah .....	39
3. Birokrasi dan Otonomi Sekolah .....	47
a. Kekuasaan Birokrasi Pemda .....	47
b. Otonomi Sekolah dan Profesionalisme Guru .....	54

c. Intervensi Politik Birokrasi Terhadap Sekolah .....	60
B. Penelitian yang Relevan .....	66
C. Kerangka Konseptual .....	70

### **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	74
B. Lokasi Penelitian .....	77
C. Populasi dan Sampel .....	79
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	83
1. Kuesioner .....	83
2. Wawancara .....	86
3. Studi Dokumentasi .....	90
4. Observasi .....	91
5. Forum Group Discussion .....	92
E. Teknik Keabsahan Data .....	96
F. Teknik Analisis Data .....	103
1. Analisis data kuantitatif .....	103
2. Analisis data kualitatif .....	105

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Penelitian .....	116
1. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Mandailing Natal .....	116
2. Iklim Sekolah Sebelum Pilkada Langsung .....	121
a. Dimensi Sosial Sebelum Pilkada Langsung .....	122
b. Dimensi Psikologis Sebelum Pilkada Langsung .....	139
c. Dimensi Birokratik Sebelum Pilkada Langsung .....	156
d. Dimensi Fisik Sebelum Pilkada Langsung .....	171
3. Iklim Sekolah Setelah Pilkada Langsung .....	184
a. Dimensi Sosial Setelah Pilkada Langsung .....	184
b. Dimensi Psikologis Setelah Pilkada Langsung .....	204
c. Dimensi Birokratik Setelah Pilkada Langsung .....	223
d. Dimensi Fisik Setelah Pilkada Langsung .....	238

4. Pelibatan Guru dalam Pilkada Langsung .....	255
a. Keterlibatan Birokrasi .....	255
b. Pelibatan Guru .....	262
B. Pembahasan .....	274
1. Kondusifitas Iklim Sekolah Sebelum dan Setelah Pilkada Langsung .....	274
a. Kondusifitas Iklim Sekolah Sebelum Pilkada Langsung .....	274
1) Aspek Keterbukaan sebagai Harmonisasi Hubungan Baik Guru pada Dimensi Sosial Sebelum Pilkada Langsung .....	275
2) Perlakuan Adil dan Keamanan Karir Guru sebagai Penguat Motivasi Kondusifnya Dimensi Psikologis Sebelum PilkadaLangsung .....	281
3) Keselarasan Aspek Standar Prestasi dan Aturan sebagai Basis Dimensi Birokratik Sebelum Pilkada Langsung ....	290
4) Interaksi Kepuasan Kerja dan Kebanggaan sebagai Stabilitas Suasana Dimensi Fisik Sebelum Pilkada Langsung .....	296
b. Kondisi Degradasi Iklim Sekolah Setelah Pilkada Langsung .....	303
1) Pembatasan Informasi dan Keterlibatan sebagai Akar Melemahnya Dimensi Sosial Setelah Pilkada Langsung .....	303
2) Aspek Keamanan dan Penghargaan sebagai Penghambat Tumbuh Kembangnya Dimensi Psikologis Setelah Pilkada Langsung .....	314
3) Aspek Beban Kerja dan Standar Prestasi sebagai Penekan Suasana Dimensi Birokratik Setelah Pilkada Langsung .....	324
4) Aspek Kesesuaian Fasilitas sebagai Pemicu Melemahnya Respon Guru dalam Dimensi Fisik Setelah Pilkada Langsung .....	331
2. Keterlibatan Guru dalam Pilkada Langsung .....	344

a. Pola Pelibatan .....	346
b. Tingkat Keterlibatan .....	351
c. Alasan Menerima Pelibatan .....	353
d. Basis Kuasa yang Digunakan .....	356
e. Alasan Penggunaan Kekuasaan .....	358
3. Dampak Pilkada Langsung Terhadap Iklim Sekolah .....	362
a. Dampak Pilkada Langsung dari Dimensi Sosial .....	364
b. Dampak Pilkada Langsung dari Dimensi Psikologis .....	367
c. Dampak Pilkada Langsung dari Dimensi Birokratik .....	369
d. Dampak Pilkada Langsung dari Dimensi Fisik .....	372
4. Intervensi Politik dan Lemahnya Posisi Daya Tawar Guru sebagai Penyebab Pilkada Langsung Berdampak Terhadap Iklim Sekolah .....	375
5. Pola Mengatasi Dampak Pilkada Langsung Terhadap Iklim Sekolah.....	385
a. Proteksi Intervensi Politik Kepentingan KDH Terhadap Sekolah .....	387
b. Independensi lembaga profesi pendidik .....	389
c. Penetapan Sangsi bakal Calon Kepala Daerah .....	392
d. Penetapan Tata Disiplin Kepala Daerah .....	393
C. Keterbatasan Penelitian .....	397

## **BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	399
B. Implikasi .....	400
C. Saran .....	401

DAFTAR RUJUKAN .....	404
----------------------	-----

LAMPIRAN .....	415
----------------	-----

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Aspek dari Dimensi Iklim Sekolah. ....	28
2. Kondisi Personalia Sekolah Lanjutan Atas Negeri di Kabupaten Mandaling Natal Tahun 2013 .....	78
3. Sekolah dan Jumlah Guru yang Ditetapkan Sebagai Sampel .....	81
4. Teknik Pengkodean .....	95
5. Hasil Uji Validasi dan Reliabilitas Butir Soal .....	97
6. Data Kuantitatif Hasil Dimensi Sosial dari Iklim Sekolah Sebelum Pilkada Langsung .....	122
7. Potret Dimensi Sosial dari Iklim Sekolah Sebelum Pilkada Langsung .....	137
8. Data Kuantitatif Dimensi Psikologis dari Iklim Sekolah Sebelum Pilkada Langsung .....	139
9. Potret Dimensi Psikologis dari Iklim Sekolah Sebelum Pilkada Langsung .....	154
10. Data Kuantitatif tentang Potret Dimensi Birokratik dari Iklim Sekolah Sebelum Pilkada Langsung .....	156
11. Potret Dimensi Birokratik dari Iklim Sekolah Sebelum Pilkada Langsung .....	169
12. Data Kuantitatif Dimensi Fisik dari Iklim Sekolah Sebelum Pilkada Langsung .....	171
13. Potret Dimensi Fisik dari Iklim Sekolah Sebelum Pilkada Langsung .....	181
14. Poret Iklim Sekolah Sebelum Pilkada Langsung .....	183
15. Data Kuantitatif Iklim Sekolah Setelah Pilkada Langsung dari Dimensi Sosial .....	185
16. Potret Dimensi Sosial dari Iklim Sekolah Setelah Pilkada Langsung .....	203

17. Data Kuantitatif Iklim Sekolah Setelah Pilkada Langsung dari Dimensi Psikologis .....	205
18. Potret Dimensi Psikologis dari Iklim Sekolah Setelah Pilkada Langsung .....	221
19. Data Kuantitatif Iklim Sekolah Setelah Pilkada Langsung dari Dimensi Birokratik .....	223
20. Potret Dimensi Birokratik dari Iklim Sekolah Setelah Pilkada Langsung .....	236
21. Data Kuantitatif Iklim Sekolah Setelah Pilkada Langsung dari Dimensi Fisik .....	238
22. Potret Dimensi Fisik dari Iklim Sekolah Setelah Pilkada Langsung .....	250
23. Potret Iklim Sekolah Setelah Pilkada Langsung .....	252
24. Potret Iklim Sekolah Sebelum Pilkada Langsung Berdasarkan Dimensi yang Diurai Tiap Sekolah .....	253
25. Potret Iklim Sekolah Setelah Pilkada Langsung Berdasarkan Dimensi Diurai Tiap Sekolah .....	254
26. Potret Iklim Sekolah Sebelum dan Setelah Pilkada Langsung Berdasarkan Dimensi Tiap Jenis Sekolah .....	254
27. Matrik Potret Iklim Sekolah Sebelum Pilkada Langsung .....	300
28. Matrik Potret Iklim Sekolah Setelah Pilkada Secara Umum .....	337
29. Matrik Rekapitulasi Hasil Penelitian .....	393

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Diagram Proporsi PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 .....	7
2. Bagan Alir Proses Pilkadasung di Kabupaten/Kota .....	42
3. Kerangka Konseptual .....	73
4. Proses Analisis Data Model Interaktif .....	111
5. Peta Kabupaten Mandailing Natal .....	118
6. Matrik Dimensi Sosial Sebelum Pilkada Langsung .....	138
7. Matrik Dimensi Psikologis Sebelum Pilkada Langsung .....	155
8. Matrik Dimensi Birokratik Sebelum Pilkada Langsung .....	170
9. Matrik Dimensi Fisik Sebelum Pilkada Langsung .....	182
10. Matrik Dimensi Sosial Setelah Pilkada Langsung .....	204
11. Matrik Dimensi Psikologis Setelah Pilkada Langsung .....	222
12. Matrik Dimensi Birokratik Setelah Pilkada Langsung .....	237
13. Matrik Dimensi Fisik Setelah Pilkada Langsung .....	251
14. Proses Pelibatan Guru Dalam Pilkada Langsung .....	30
15. Pola Proteksi Intervensi Politik Pilkada Langsung oleh KDH Terhadap Iklim Sekolah .....	391

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Dokumen Izin Penelitian .....	415
2. Tabel Penentuan Jumlah Sampel Rumus Isaac dan Michael .....	419
3. Tabel Kisi-Kisi Penelitian Iklim Sekolah .....	420
4. Dokumen Uji Coba Angket Penelitian .....	425
5. Dokumen Hasil Uji Coba Butir Soal dari Angket Penelitian .....	433
6. Dokumen Angket Penelitian Pengukuran Iklim Sekolah .....	441
7. Tabulasi Data Kuantitatif dari Iklim Sekolah .....	445
8. Panduan Pengambilan Data Kualitatif .....	469
9. Simpulan Hasil Wawancara .....	475
10. Dokumentasi Forum Group Discussion .....	526
11. Kode Nama Jabatan .....	529
12. Kode Nama Informan .....	530
13. Contoh Dokumen Sekolah .....	531
14. Dokumentasi FGD, Wawancara dan Pengamatan Fisik .....	537
15. Sruktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Madina .....	538
Sruktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Madina .....	539

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan bangsa yang mencakup seluruh aspek kehidupan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia merupakan bagian strategis dalam pembangunan karena selain sebagai objek, juga sekaligus subjek pembangunan, sehingga pengembangannya melalui pendidikan sangatlah penting. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian para ahli yang dihimpun oleh Jhingan (2008:415-416) yang menggambarkan pentingnya investasi sumber daya manusia dalam pembangunan suatu bangsa melalui pendidikan yang diuraikannya sebagai berikut:

Hasil berbagai studi ahli ekonomi, menunjukkan dana yang diinvestasikan pada sektor pendidikan membawa kenaikan pendapatan nasional yang lebih besar dibandingkan dengan dana yang digunakan untuk modal investasi fisik atau barang modal lainnya. Para ekonom menyebut, kelangkaan investasi pada modal manusia merupakan satu penyebab lambannya pertumbuhan suatu negara. Tanpa pengembangan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan, maka produktivitas modal fisik akan merosot. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas dalam pembangunan bangsa, karena berperan penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dalam percepatan pembangunan bangsa.

Indonesia kondisi pendidikannya oleh *For All Global Monitoring Report* 2013, disebut masih jauh tertinggal dan bergerak lambat bila dibandingkan dengan negara lain di dunia, yang didasarkan pada laporan UNESCO, dimana tahun 2007 pendidikan Indonesia pada urutan 62, tahun 2010 pada urutan 65, dan tahun 2012 pada urutan 69. Pada tingkat negara berkembang saja, pendidikan Indonesia masih kalah bila dibandingkan dengan negara-negara seperti Brunei

Darussalam yang berada di peringkat ke-34 dan Malaysia diperingkat ke-65. UNESCO memberi alasan terjadinya kondisi tersebut salah satunya karena tidak meratanya pembangunan sektor pendidikan, (<http://www.unesco.org/new/en/unesco/world-wide/asia-and-the-pacific>).

Kondisi keterpurukan pendidikan tersebut, oleh Pemerintah Indonesia dengan penuh kesadaran akan pentingnya pendidikan, telah mengupayakan pengembangan pendidikan yang dapat mengejar ketertinggalan dengan menerbitkan berbagai kebijakan. Kebijakan dari sisi pendanaan, telah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah dengan menyediakan dana pendidikan yang ditetapkan dalam aturan mencapai 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, secara umum kualitas pendidikan di Indonesia masih saja tetap jauh dari kata baik.

Upaya strategis untuk mengatasi masalah tersebut, oleh pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka memberi kesempatan yang sama dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan sistem otonomi daerah. Pada pasal 14 ayat 1 huruf (f) disebutkan bahwa satu dari beberapa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan pendidikan. Fasli & Dedi (2009;108) menyebut “Terbitnya aturan otonomi daerah, telah merubah pengelolaan manajemen pendidikan dari yang sentralistik kependekatan desentralistik. Perubahan ini memberi ruang yang luas untuk perbaikan

pendidikan di daerah-daerah, sebagai akumulasi dari kondisi pendidikan nasional”.

Selain peluang otonomi pendidikan, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi arah baru terhadap praktik politik yang lebih demokratis untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dan satu paket. Aturan ini menjadi dasar terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada pasal 4 ayat 1 disebutkan: “Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD”. Lebih lanjut pada pasal 4 ayat 3 berbunyi: “Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan tataran politik yang sangat mendasar pada penyelenggaraan pemilihan Pasangan Kepala Daerah dalam hal lembaga penyelenggara pemilihan dan tata cara pemilihan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sebelumnya menjadi lembaga penyelenggara dan pemilih, tugas tersebut dilaksanakan oleh lembaga independen dengan nama Komisi Pemilihan Umum Daerah (selanjutnya dapat ditulis KPUD), sedangkan pemilihnya langsung oleh rakyat sebagai pemilih dengan prinsip “*one person one vote*” (setiap pemilih memiliki satu suara).

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya dapat ditulis pilkada) Secara Langsung dengan prinsip *one person one vote* ini dipandang

sebagai langkah strategis politik yang lebih demokrasi, dengan tujuannya sebagaimana dijelaskan oleh Firmanszah (2008; 66-68) bahwa:

Langkah strategis dengan prinsip “*one person one vote*” ini ditujukan untuk memperluas, memperdalam dan meningkatkan mutu demokrasi; mengembangkan otonomi yang memungkinkan masyarakat lokal menentukan nasibnya sendiri dengan mengakui aspirasi dan inisiatif lokal; menumbuhkan rasa tanggung jawab, pelayanan yang bermutu, menciptakan stabilitas politik dan pemerintah yang efektif, peluang besar mendapatkan seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat serta peluang meningkatkan mutu kepemimpinan nasional yang lahir dari tingkat daerah

Perubahan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pendekatan otonomi yang lebih kuat tersebut, disatu sisi dapat mengubah kondisi tata kelola pendidikan dengan menguatnya otonomi penyelenggaraan pendidikan di daerah. Namun, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang juga memuat penyelenggaraan pilkada secara langsung, membuat birokrasi semakin rentan terhadap intervensi politik pada proses pilkada. Seperti disampaikan Siti, (2009:183) bahwa:

Secara konsep maupun praktik, interaksi birokrasi dengan politik tidak terhindarkan. Perubahan tata cara penyelenggaraan dan pelaksana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Pilkadasung) oleh KPU, pada kenyataannya belum dapat mengubah posisi birokrasi dalam sistem politik di daerah. Birokrasi masih menjadi kekuatan politik-pemerintah formal.

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa, meskipun pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan birokrasi untuk terlibat dalam politik praktis, namun tetap juga belum terhindarkan. Larangan tersebut sudah cukup banyak seperti: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, melarang PNS menjadi anggota partai politik; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004, juga menetapkan

larangan PNS menjadi Anggota Pengurus Partai Politik; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang juga menerbitkan pasal yang melarang Pasangan Calon melibatkan birokrasi. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, PNS yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik harus diberhentikan sebagai PNS. Ketentuan tersebut memang tidak melarang hak-hak politik PNS, akan tetapi melarang PNS dengan segala konsekuensinya untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik (politik praktis). Dengan demikian, PNS wajib bersikap netral dalam proses pilkada, meskipun pada kenyataannya di lapangan seperti disampaikan Ahmad (2012:86) dalam pengamatannya bahwa:

Dalam praktik proses pilkada, birokrasi dipandang sebagai satu kekuatan yang potensial oleh pasangan calon kepala daerah. Walaupun proporsinya tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pemilih, namun dipercaya pengaruh politiknya sangat besar terhadap lingkungannya. Bukan hanya sekedar pengamatan, tetapi telah banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi selalu terlibat dalam pentas pemilihan kepala daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota karena kuatnya simbiosis mutualisma antara kemenangan kepala daerah dengan jabatan pejabat birokrasi.

Makna yang sama juga disampaikan oleh Firmansyah (2008:96) dalam bukunya *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas* bahwa:

Meskipun persentase PNS sebagai pemilih dari sisi jumlah tidak terlalu signifikan dalam pilkada langsung, namun terlihat adanya suatu keyakinan bahwa birokrasi mempunyai peranan yang kuat dalam menentukan kemenangan pasangan calon. Terlebih pula bila seluruh birokrat dapat diarahkan pada satu pasangan calon, sebagai akibat dari kapasitas pengaruh atas kekuatan kekuasaan, anggaran, organisasi yang sistematis dan terstruktur, yang mencakup semua wilayah.

Keterlibatan PNS dalam pilkada langsung tidak hanya sampai pada birokrasi saja. Meskipun sulit rasanya secara logis untuk mempercayai bahwa pelaksana pendidikan telah digunakan sebagai alat kekuasaan, namun

kenyataannya guru telah ikut serta berpolitik praktis. Hal ini sesuai penjelasan Tilaar (2009:126) sebagai berikut:

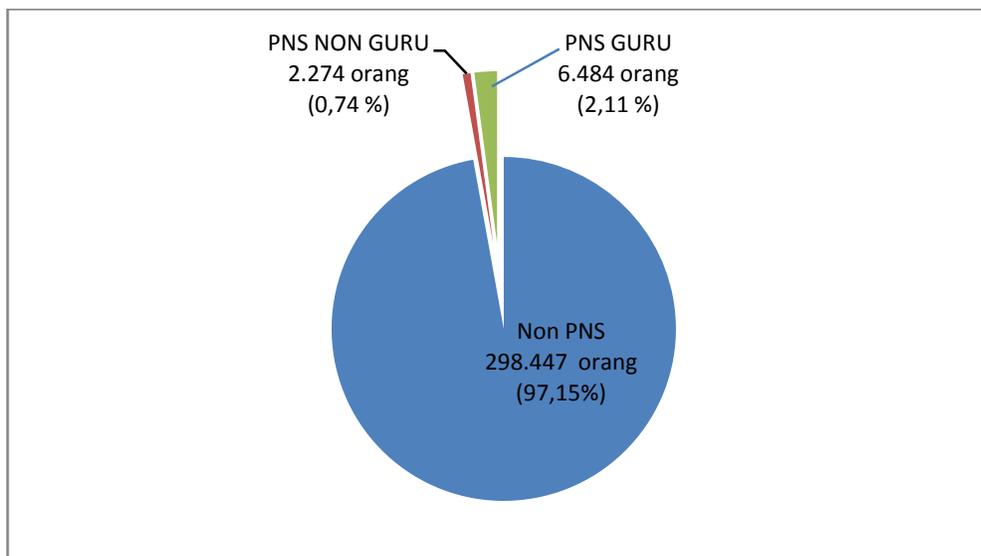
Sepintas, rasanya tidak terdapat hubungan antara kekuasaan dengan pendidikan. Relatif tidak pernah terdengar bahwa pelaku pendidikan dikerahkan untuk mengambil alih suatu kekuasaan politik, ekonomi atau bentuk kekuasaan lainnya. Bahkan yang sering dibayangkan adalah bahwa proses pendidikan merupakan proses yang berjalan dalam suasana kedamaian, dalam kehidupan bersama manusia yang tanpa kekerasan.

Pada kenyataannya, kekuatan politik praktis yang dimiliki guru dalam pilkadasung menjadi peluang besar bagi pasangan Calon Kepala Daerah. Dengan demikian, beberapa pasangan Calon Kepala Daerah melakukan berbagai upaya untuk menjadikan guru sebagai alat politik (tim sukses). Sekolah dapat menjadi bagian dari lembaga dan alat politik praktis yang tidak resmi. Mereka merupakan alat politik yang sangat potensial untuk kepentingan tertentu melalui tekanan kekuasaan birokrasi di bidang pendidikan.

Praktek keterlibatan guru dalam pilkada langsung, dikuatkan pula oleh Elvinaro (2008:92) yang menyebut bahwa “Guru pada sekolah negeri sebagai PNS, berada di bawah kekuasaan birokrasi, oleh Calon Pasangan Kepala Daerah dipandang sebagai potensi yang cukup menentukan kemenangan”. Beberapa alasan yang kuat dalam keterlibatan tersebut, menurut beliau dapat disarikan sebagai berikut: (a) Guru di sekolah negeri berada dalam kekuasaan birokrasi yang terstruktur di pemerintahan daerah. Mereka mudah diarahkan karena promosi, mutasi, dan demosi guru ditentukan oleh pemerintah daerah dengan kekuasaannya; (b) Pada umumnya, guru ditugaskan menyebar hingga wilayah luar dan memiliki keluarga yang juga memiliki hak pilih, sehingga kuat penyebaran pengaruhnya; (c) Guru sangat berpengaruh karena memiliki hubungan emosional dengan masyarakat, yang mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan anak-anak masyarakat, terutama yang berada di pedesaan; (d) Guru sangat dihormati

masyarakat karena memiliki pengetahuan yang tergolong baik sehingga didengar anjurannya. (e) Guru dapat mempengaruhi sejumlah murid yang masih dalam proses pendidikan untuk memilih calon kepala daerah tertentu. Terutama peserta didik yang duduk di kelas XII, yang pada umumnya merupakan pemilih tetap (Elvinaro, 2008:92-94)

Proses politik di Kabupaten Mandailing Natal (lebih lanjut dapat ditulis Madina), juga tidak menutup kemungkinan termasuk dalam hal seperti ini. Proporsi pemilih yang bekerja sebagai PNS di Kabupaten ini juga tidak begitu besar jika dibandingkan dengan total pemilih. Gambar 1. menunjukkan bahwa jumlah pemilih dengan jenis pekerjaan sebagai PNS di Kabupaten Madina berkisar 2,85% (guru 2,11% dan non-guru 0,74%) dari total pemilih sebanyak 307.201 orang.



Gambar 1. Diagram Proporsi PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 (Sumber: KPU Kab. Madina, Kemenag Madina dan BKD Madina, 2012)

Guru dan murid yang berhak memilih, di Kabupaten Madina meskipun dari jumlahnya tidak terlalu signifikan untuk menambah perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun guru cukup potensial dalam pemenangan pilkada. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Madina dan Kantor Kementerian Agama (lebih lanjut dapat ditulis Kemenag) Kabupaten Madina Tahun 2013 terlihat bahwa jumlah Kepala Sekolah Lanjutan Atas yang berstatus negeri di Kabupaten Madina adalah 33 orang, guru PNS dan Non PNS sebanyak 1082 orang dan siswa kelas XII yang umumnya sudah memiliki hak suara berjumlah 3782 (Tabel 2). Angka tersebut juga cukup potensial dalam upaya pemenangan salah satu calon kepala daerah.

Proses pilkada langsung di Madina, juga diduga telah memanfaatkan sektor pendidikan untuk menyukseskan pasangan calon kepala daerah. Pengamatan peneliti yang secara langsung di lapangan selama proses pilkada langsung di Kabupaten Madina Tahun 2010, menemukan guru-guru dan kepala sekolah yang ikut berpolitik praktis sebagai tim sukses. Demikian juga pengakuan dari beberapa kepala sekolah dan guru yang menyatakan mereka terlibat dalam proses pilkada, seperti hasil wawancara dengan bekas kepala sekolah berikut:

Kami kepala sekolah lanjutan di Wilayah Mandailing, pada tahun 2005 pernah melakukan pertemuan rahasia bersama kepala UPT di satu sekolah di Panyabungan. Isinya memerintahkan para kepala sekolah wajib ikut serta secara aktif bersama guru-guru untuk memenangkan incumbent di priode tahun 2005.... Pada pilkada tahun 2010, dibuat juga pertemuan yang isinya, wajib ikut serta aktif memenangkan pasangan calon sesuai petunjuk Bupati.... Sebahagian kepala sekolah bekerja terang-terangan bersama gurunya sebahagian dengan cara sembunyi. (IV.W.e-ks.Hart.10012013)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa guru-guru telah dimanfaatkan sebagai tim pemenangan dalam proses pilkada oleh birokrasi. Dengan demikian, pengamatan peneliti pada proses pilkada dan pengakuan kepala sekolah tersebut, merupakan kenyataan keterlibatan guru, terutama mereka yang berada di sekolah negeri (PNS), terlibat dalam menyukseskan pasangan calon kepala daerah. Keterlibatan sekolah dapat dilihat dalam dua versi yakni mengikuti arahan yang terstruktur dari birokrasi dan terlibat dari kubu *non*-birokrasi.

Situasi politik pilkadasung yang terjadi di Kabupaten Madina tentu memunculkan pro-kontra dalam lingkup sekolah yang berujung pada terbentuknya kelompok-kelompok kecil, komunikasi yang kurang harmonis, kepercayaan yang menipis sehingga merusak suasana sekolah. Seperti diberitakan Harian Portibi Jumat 21/09/2012 hlm 1, yang menyebut bahwa “Mutasi kepala sekolah dan guru pada awal Juli (2012) dinilai sarat kepentingan politik. Setelah tiga bulan berjalan, banyak bekas kepala sekolah yang dijadikan guru biasa, tidak melaksanakan tugas. Di sekolah terjadi berbalas pantun, dendam lama terhadap guru pendukung penguasa terdahulu”. Harian Tondinta, Selasa 25/09/2012 hlm 1, juga mengungkapkan 18 eks kepala sekolah yang didemosi dan 27 guru yang dimutasi mengadakan nasibnya ke DPRD. “Mereka mengaku pada DPRD sudah tiga bulan tidak mengajar karena tidak mengetahui alasan pelepasan dari jabatan dan pemutasian guru ke sekolah yang jauh dari domisili mereka. Perpindahan tugas ini dianggap sangat memberatkan biaya hidup keluarga, karena akan menambah dapur baru”.

Suasana internal sekolah seperti ini merupakan kajian iklim sekolah seperti dijelaskan oleh Waasdorf, dkk (2011:117) bahwa:

Suasana yang muncul karena adanya hubungan antar personal dalam lingkungan sekolah disebut iklim sekolah, yang merupakan landasan dalam penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan produktif. Iklim sekolah yang baik dan harmonis ini, sangat diperlukan oleh semua komponen sekolah, agar dalam memerankan tugas dan fungsinya dapat berlangsung dengan suasana menyenangkan untuk tercapainya sekolah berprestasi”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menuntut komponen sekolah untuk mengedepankan pentingnya iklim sekolah yang kondusif sebagai bentuk kewajiban. Undang-Undang tersebut dengan tegas menyebutkan pada pasal 40 ayat 2 bahwa, “Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis”. Demikian pentingnya kondisufitas iklim sekolah sebagai salah satu penentu keberhasilan pada proses pembelajaran.

Dilihat dari isi berita media tersebut di atas, dan hasil pengamatan serta wawancara peneliti dengan beberapa kepala sekolah dan guru, dapatlah diuraikan bahwa suasana iklim sekolah di Kabupaten Madina terganggu, dengan suasana berikut: (a) Ketegangan suasana para kepala sekolah akibat kisruhnya promosi dan demosi kepala sekolah dimana kepala sekolah yang diangkat banyak yang pangkatnya lebih rendah dari guru di sekolahnya disisi lain, kepala sekolah banyak yang dikembalikan menjadi guru biasa ke sekolah lain, sehingga pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan yang dirasakan para pendidik sebagai suasana pendidikan berlatar belakang kepentingan politik; (b) Ketidaknyamanan melaksanakan tugas bagi guru dan kepala sekolah, akibat

terjadi mutasi dan demosi jabatan dan pemindahan tempat tugas guru, pada saat dan pasca pilkada langsung yang tidak sesuai aturan menjadi ancaman bagi guru. (c) Semangat dan tingkat kehadiran menurun karena guru yang dimutasi ke sekolah lain pasca pilkada langsung, justru jarang melaksanakan tugas karena kurang menerima keputusan pemindahan tempat tugasnya demikian juga kepala sekolah yang dilepas dari jabatan; (d) Keretakan hubungan guru akibat terjadinya kelompok-kelompok kecil diantara guru yakni guru yang mendukung *incumbent*, guru yang netral dan guru yang mendukung calon lain. Dalam kondisi lain, guru yang netral juga dikenakan sanksi oleh pasangan yang terpilih ketika memegang kekuasaan karena dianggap sebagai individu yang tidak mendukung.

Iklim sekolah yang demikian dapat menyebabkan proses belajar mengajar tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga merugikan peserta didik dan mempengaruhi mutu pendidikan di Kabupaten Madina. Suasana ini berlangsung pada tiap jenjang tingkat sekolah negeri, akan tetapi pada penelitian ini difokuskan hanya pada sekolah lanjutan atas berstatus negeri, dengan asumsi selain peserta didiknya telah ada yang memiliki hak memilih, para pendidiknya juga dianggap kaum intelektual karena telah mengenyam pendidikan diperguruan tinggi. Seperti dikemukakan Yoyon (2011:58) bahwa “Seyogyanya orang yang berpendidikan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan, sikap dan perilakunya semakin demokratis. Selain itu, orang yang berpendidikan memiliki kesadaran dan tanggungjawab terhadap bangsa dan negara yang lebih baik dibandingkan individu yang kurang berpendidikan”. Tingkat pendidikan guru yang cukup baik tersebut, bila dibandingkan dengan kondisi suasana di atas,

diyakini terdapat alasan yang menyebabkan sejumlah guru tidak menempatkan dirinya pada posisi yang seharusnya netral, sehingga berpengaruh terhadap iklim sekolah. Kondisi ini tepat untuk diteliti lebih jauh, sehingga guru dapat terlepas dari situasi dilema dalam demokrasi politik pilkada langsung. Penelitian secara ilmiah akan bermuara pada penemuan akar permasalahan sebagai dasar dalam perumusan solusi penyelesaian, yang akhirnya iklim sekolah yang kondusif dapat terwujud.

## **B. Fokus Penelitian**

Mencermati latar belakang masalah tersebut sebelumnya, maka penelitian ini fokus terhadap ‘iklim sekolah’ yang ditinjau dari ‘dampak politik pilkada langsung’, yang diurai dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimanakah iklim Sekolah Lanjutan Atas Negeri sebelum dan setelah Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Bagaimanakah keterlibatan guru Sekolah Lanjutan Atas Negeri pada proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Mandailing Natal ?
3. Bagaimanakah dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung terhadap iklim Sekolah Lanjutan Atas Negeri di Kabupaten Mandailing Natal ?
4. Mengapakah pemilihan kepala daerah secara langsung berdampak terhadap iklim Sekolah Lanjutan Atas Negeri di Kabupaten Mandailing Natal ?
5. Bagaimanakah pola mengatasi dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung terhadap iklim Sekolah Lanjutan Atas Negeri di Kabupaten Mandailing Natal ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui iklim Sekolah Lanjutan Atas Negeri pada masa sebelum dan setelah Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Mandailing Natal, untuk dibandingkan, sehingga dapat diketahui bagaimana akibat dari pilkada langsung terhadap iklim sekolah.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis keterlibatan guru Sekolah Lanjutan Atas Negeri dan tingkat keterlibatannya pada proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Mandailing Natal.
3. Mengetahui dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung terhadap iklim Sekolah Lanjutan Atas Negeri di Kabupaten Mandailing Natal .
4. Mengungkap faktor penyebab pemilihan kepala daerah secara langsung berdampak terhadap iklim Sekolah Lanjutan Atas Negeri di Kabupaten Mandailing Natal.
5. Merumuskan pola untuk mengatasi dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung terhadap iklim Sekolah Lanjutan Atas Negeri di Kabupaten Mandailing Natal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Beranjak dari tujuan penelitian tersebut di atas, lebih lanjut dipaparkan manfaat penelitian yang diharapkan berikut ini.

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan iklim sekolah dan teori tentang iklim sekolah dari sisi dimensi sosiologis, psikologis, birokratis dan fisik sebagai bagian dari ilmu pendidikan sehingga dapat merumuskan pola untuk pemantapan iklim sekolah terutama dalam

hubungannya dengan lingkungan luar seperti dampak negatif Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.

2. Bahan masukan dalam pengambilan kebijakan penataan penyelenggaraan sekolah bagi Pemerintah, Gubernur, Bupati, Kepala BKD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama di wilayah penelitian.
3. Bahan motivasi bagi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru untuk lebih berani dan peka dalam memelihara iklim sekolah yang berhubungan dengan proses politik pilkada langsung di wilayah penelitian.
4. Bahan masukan untuk penguatan Dewan Pendidikan di daerah, komite sekolah dan terutama bagi PGRI sebagai kelembagaan guru dalam kapasitasnya sebagai masyarakat intelektual yang benar-benar dapat mengadvokasi lembaganya untuk meningkatkan profesionalisme yang dapat memisahkan diri dari kepentingan individu atau kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan etika keguruan di wilayah penelitian.